



Australian Government



www.ausaid.gov.au

Strengthening Indonesia's decentralisation

Memperkuat desentralisasi di Indonesia





Since the late 1990s, decentralisation has been a key feature of Indonesia's transition to democracy, shifting the responsibility of providing services from national to local governments.

This decentralised approach has been successful in bringing governments and communities closer, but has led to different areas developing at different speeds due to an uneven distribution of human and financial resources. This can result in poor people not getting access to proper health care or education.

The Australian Government, through its aid program (AusAID), is working with Indonesia to overcome poverty by improving the quality of public services across the archipelago.



Australia's assistance

AusAID's A\$62 million Australia – Indonesia Partnership for Decentralisation program is supporting local governments in remote and poor communities in Eastern Indonesia with their planning and budgeting.

Australia is increasing people's access to health, education and infrastructure services by working with local governments and civil society organisations that deliver or make sure these services are available.



Bantuan Australia

Program Kemitraan Australia – Indonesia untuk Desentralisasi senilai A\$62 juta mendukung pemerintah daerah di daerah terpencil dan masyarakat miskin di Indonesia bagian Timur dalam perencanaan dan penyusunan anggaran.

Australia meningkatkan akses kepada layanan-layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga rakyat yang menyediakan atau memastikan layanan-layanan ini tersedia.





More than 5,000 local village facilitators have been trained in participatory planning processes, motivating their communities to discuss development issues at the local government level. Since 2008, over 773 local regulations have been ratified ensuring better service delivery to more than 1,000 villages.

The program works in East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, South Sulawesi and South East Sulawesi.



Membangun peran masyarakat sipil

Program lima tahun untuk Pembangunan dan Penguatan LSM dan lembaga masyarakat senilai A\$29 juta bekerjasama dengan 120 LSM di empat provinsi di Indonesia bagian Timur agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, perbaikan layanan publik dan meningkatkan ekonomi setempat.

Lebih dari 5,000 fasilitator desa telah dilatih dalam proses perencanaan partisipatif, memotivasi masyarakat setempat untuk membahas isu-isu pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Sejak 2008, lebih dari 773 peraturan daerah telah diratifikasi sehingga masyarakat di lebih dari 1000 desa dapat menikmati layanan publik yang lebih baik.

Program ini bekerja di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.



Ensuring women have their say

Women are involved in local government decision making thanks to Australia's development assistance. Active participation of women in villages, sub-districts and districts is now over 50 per cent in AusAID's programs.

Women's groups lead and participate in establishing community development plans for local government, focusing government attention and increasing resources for maternal and neonatal health, social assistance, microfinance and village infrastructure needs.





Memastikan kaum perempuan ikut bersuara

Kaum perempuan kini terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah berkat bantuan pembangunan Australia. Partisipasi aktif kelompok-kelompok perempuan di pedesaan, kecamatan dan kabupaten kini lebih dari 50 persen di wilayah sasaran program AusAID.

Kelompok-kelompok perempuan memimpin dan berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan masyarakat untuk pemerintah daerah, turut mengarahkan perhatian pemerintah dan meningkatkan alokasi sumber daya untuk layanan-layanan seperti kesehatan ibu dan bayi, bantuan sosial, kredit kecil dan kebutuhan infrastruktur desa.

Australia is encouraging communities to participate in monitoring local government spending. This community participation is pushing for government budgeting to respond to the needs of the poor and vulnerable, women and children.

Communities and local governments are also encouraged to give feedback to the national government about policy implementation.



Memberi suara kepada masyarakat

Australia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau anggaran belanja pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat ini memastikan agar anggaran pemerintah memperhatikan kebutuhan kaum miskin dan lemah, kaum perempuan dan anak-anak.

Masyarakat dan pemerintah daerah juga didorong untuk memberi masukan kepada pemerintah nasional terhadap pelaksanaan kebijakan.

Improving essential skills and transparency

Australia is improving financial management skills within the Indonesian Government and contributing to the analysis of spending in provinces and districts.

To increase transparency, AusAID is sharing research and results from our decentralisation programs with local governments and communities organisations.

This transparency is helping strengthen the national government's ability to evaluate local government performance, implement Indonesia's Freedom of Information law and improve communication between local governments and their communities.

Meningkatkan kemampuan dasar dan transparansi

Australia juga mendukung peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan keuangan dan berkontribusi terhadap analisa pembelanjaan di provinsi dan kabupaten.

Untuk meningkatkan transparansi, AusAID berbagi hasil penelitian dan pelajaran dari program desentralisasi kepada pemerintah daerah dan organisasi-organisasi masyarakat.

Transparansi membantu memperkuat kemampuan pemerintah nasional untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, menerapkan kebijakan Kebebasan Informasi dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.



